

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN

Oleh
Nur Ain Saputri
2105040017

Abstrak

Permasalahan *over* kapasitas merupakan isu krusial dalam sistem pemasyarakatan, termasuk Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun. Yang dimana pada tahun 2024 jumlah narapidana di Rumah Tahanan ada 608 orang narapidana sementara kapasitas Rumah Tahanan tersebut hanya 258 orang narapidana. Hal ini menyebabkan Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun mengalami *over* kapasitas yang sangat signifikan. Dari 608 orang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 132 orang narapidana sementara 476 orang narapidana lainnya gagal mendapatkan pembebasan bersyarat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan terkait kapasitas hunian yang berlebihan. Hasil *kuesioner* dari 53 narapidana menunjukkan bahwa mereka secara umum merasa puas dengan implementasi program ini, karena mereka mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai hak mereka atas pembebasan bersyarat. Selama prosesnya, para narapidana harus memenuhi syarat yuridis, serta berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Sebagian besar narapidana memahami dan menyadari hak mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yang dibuktikan dengan adanya informasi yang tersedia melalui *website*, baliho, dan anjungan mandiri di Rutan. Faktor kendala yang menghambat prosesnya. Kendala utama yang dihadapi antara lain adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia Masalah *over* kapasitas di rutan menyebabkan kesulitan dalam pengawasan terhadap narapidana, yang berujung pada pelanggaran disiplin seperti perkelahian antar narapidana atau ketidakpatuhan terhadap pembinaan, yang dapat mempengaruhi hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan memperlambat proses pembebasan bersyarat, keterlambatan administrasi, tidak adanya penjamin keluarga, dan pelanggaran disiplin. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahuinya proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, faktor kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan dampak pembebasan bersyarat terhadap *Over* Kapasitas Rutan.

Kata kunci: Pembebasan bersyarat, Rumah Tahanan, Narapidana.

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN

Oleh
Nur Ain Saputri
2105040017

Abstract

The problem of overcapacity is a crucial issue in the correctional system, including the Tanjung Balai Karimun Class IIB Detention Center. In 2024, the number of inmates in the Detention Center was 608 inmates while the Detention Center's capacity was only 258 inmates. This caused the Tanjung Balai Karimun Class IIB Detention Center to experience very significant overcapacity. Of the 608 inmates who received parole, only 132 inmates were inmates while 476 other inmates failed to get parole. The purpose of this study was to determine the process of granting parole to inmates at the Tanjung Balai Karimun Class IIB Detention Center. The research method used was a sociological or empirical legal research method. The results of this study indicate that the implementation of parole at the Tanjung Balai Karimun Class IIB Detention Center has been running well, although it still faces several challenges related to excessive occupancy capacity. The results of the questionnaire from 53 inmates showed that they were generally satisfied with the implementation of this program, because they received clear and complete information regarding their rights to parole. During the process, inmates must meet legal requirements and behave well during their detention. Most inmates understand and are aware of their right to parole, as evidenced by the availability of information on websites, billboards, and self-service kiosks at detention centers. Obstacles hinder the process. The main obstacles faced include limited human resources. Overcrowding in detention centers makes it difficult to supervise inmates, leading to disciplinary violations such as fights between inmates or non-compliance with guidance. This can affect inmates' rights to remission and delay the parole process. Administrative delays, the lack of family guarantors, and disciplinary violations are among the reasons why this study aims to determine the process of implementing parole, the obstacles involved in implementing parole, and the impact of parole on detention center overcrowding.

Keywords: Parole, Detention Center, Inmates.